



Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan: Konsep dan Praktek

(Malaysia's Defense Diplomacy in the South Cina Sea: Concepts and Practices)

Binsar Simorangkir, Helga Farida Tampubolon, Lazuardi Loqman Ar Rahman,
Muhammad Reyhan, RR Zahroh Hayati Azizah
Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding Author: rrazizah14@gmail.com

Abstract

The concept of defense diplomacy does not have a universally recognized definition; therefore, each country tends to have its definition, which is then included in its defense white paper. The concept of diplomacy for Malaysia itself is defined as creating stable international relations with other countries. Malaysia has a defense diplomacy strategy known as quiet diplomacy. One of the problems that threaten Malaysia's maritime economy and sovereignty that continues to this day is the South Cina Sea conflict. This conflict occurred because of a unilateral claim made by the Chinese government with the issuance of a map that later contained a nine-dash line. In dealing with this problem, Malaysia then implemented the concept of defense diplomacy in the multilateral realm, namely through official forums, namely the ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) and the ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus). This report was prepared using a descriptive-narrative method obtained through interviews with resource persons and a literature study. The purpose of this report is to serve as a theoretical reference for the concepts and practices of Malaysian defense diplomacy.

Keywords: *Defence Diplomacy, Quiet Diplomacy, ADMM dan ADMM Plus*



1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman, konsep diplomasi militer telah menjadi bagian dari konsep yang lebih luas, diplomasi pertahanan. Istilah yang relatif baru ini, telah menggantikan istilah yang sampai sekarang banyak digunakan yaitu diplomasi militer. Istilah ini sebenarnya tidak memiliki definisi yang diakui secara universal. Berakar pada akhir Perang Dingin dan keadaan geopolitik yang terus berubah. Diplomasi pertahanan atau *defence diplomacy* bukanlah operasi militer, melainkan penggunaan cara damai institusi pertahanan suatu negara untuk mengkoordinasikan pemerintah dan institusi negara lain demi mencapai hasil yang diinginkan. Ini dapat dipraktikkan untuk tujuan pencegahan atau peringatan yang relevan karena termasuk dalam ruang lingkup dan tujuannya, diantaranya seperti memberikan kesempatan untuk berbicara, membangun kepercayaan, atau meminimalkan permusuhan. Diplomasi pertahanan sering kali beradaptasi pada kondisi aksi dan berkembang dengan perubahan paradigma hubungan internasional kontemporer. Secara tradisional, kekuatan militer atau pertahanan digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan militer secara langsung, tetapi pada akhir Perang Dingin, perannya diperluas untuk mengamankan perdamaian, dengan menggunakan berbagai instrumen yang berkaitan dengan pertahanan.

Bagi Malaysia konsep diplomasi pertahanan merupakan salah satu cara dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya. Salah satu yang menjadi fokus dalam praktik konsep diplomasi pertahanan yang dilakukan Malaysia adalah dalam menanggapi permasalahan di Laut Cina Selatan. Konflik ini menjadi perhatian Pemerintah Malaysia karena mengancam kedaulatan negaranya. Konflik ini secara garis besar melibatkan beberapa negara yang disebut dengan *claimant state*, dan Malaysia masuk kedalam kelompok tersebut. Oleh karenanya Malaysia kemudian aktif membawa isu Laut Cina Selatan ini melalui forum-forum resmi ASEAN salah satunya adalah melalui *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM Plus). Namun sebagai negara yang bermitra sangat erat dengan Cina terutama dalam



bidang ekonomi, Malaysia tentunya mempunyai cara tersendiri dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Namun walaupun memiliki cara tersendiri Malaysia tetap berada di posisi untuk tidak mengakui *nine dash line* sebagai bentuk solidaritas terhadap *claimant state* lainnya yang juga anggota *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM Plus).

2. Konsep Diplomasi Pertahanan Malaysia

Diplomasi pertahanan bukanlah operasi militer tetapi merupakan penggunaan institusi pertahanan suatu negara dalam masa damai untuk mengkooptasi pemerintah dan institusi negara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. konsep diplomasi pertahanan yang ada saat ini merupakan perluasan dari konsep diplomasi militer. Diplomasi militer sendiri pada umumnya selalu berkaitan dengan masalah misi militer serta partisipasi perwakilan militer dalam negosiasi perlucutan senjata dan pengendalian senjata." (Berndt von Staden, mantan FM FRG). Namun, konsep diplomasi pertahanan dan diplomasi militer memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan berfokus untuk membenahi hubungan diantara negara-negara lewat alur formal ataupun informal. Sedangkan diplomasi militer fokus pada penggunaan kekuatan dari militer dalam tahap diplomasi mengenai sekumpulan isu keamanan. Hadirnya diplomasi pertahanan di tengah dunia saat ini, menjadi bagian terpenting dalam kebijakan pertahanan, keamanan dan juga kebijakan luar negeri pada suatu negara. Kondisi ini merupakan hasil dari kepercayaan dan juga bentuk dukungan berbagai negara dalam pertemuan multilateral untuk membahas persoalan keamanan pada tingkat regional hingga internasional.

Tujuan utama diplomasi pertahanan adalah pembentukan dan implementasi bersama kebijakan keamanan negara, untuk menciptakan hubungan internasional yang stabil dan jangka panjang di bidang pertahanan. Fungsi diplomasi pertahanan menitik beratkan pada pemeliharaan keadaan kerja sama dan keamanan yang sudah ada antara dua negara atau lebih di kawasan yang dipilih. Diplomasi pertahanan dilakukan di banyak tingkatan: pemerintah, akademisi, LSM sipil, meminimalkan permusuhan, membangun kepercayaan antar negara, mencegah konflik dengan penggunaan personel



militer secara damai, menciptakan kerjasama yang stabil dan tahan lama, mempromosikan transparansi di bidang pertahanan. Diplomasi pertahanan adalah mekanisme pendukung dalam membangun hubungan yang baik karena yang pertama adalah politik yang berperan sebagai salah satu faktor dalam mengambil keputusan. Secara pragmatis, fungsi diplomasi pertahanan menitikberatkan pada pemeliharaan keadaan kerja sama dan keamanan yang sudah ada antara dua negara atau lebih di kawasan tertentu. Secara transformasional, fokus pada pelaksanaan tugas terkait penyelesaian krisis dan kembalinya keseimbangan, keamanan dan kerja sama.

Tujuan utama diplomasi pertahanan adalah pembentukan dan implementasi bersama kebijakan keamanan negara, untuk menciptakan hubungan internasional jangka panjang yang stabil di bidang pertahanan. Tujuan untuk *confidence building measure* atau membangun kepercayaan, “penggunaan personel militer secara damai, termasuk atase militer”, “aplikasi bersama dan terkoordinasi dari inisiatif-inisiatif kerjasama damai antara kepemimpinan pertahanan dan angkatan bersenjata untuk membangun kepercayaan, menangkal krisis dan menyelesaikan konflik.”

Bagi Malaysia, dalam menghadapi ancaman yang muncul akibat ketegangan antara dua negara besar di Laut Cina Selatan, negara tersebut telah menetapkan prioritas strategis untuk mengelola isu-isu internasional, yaitu kesejahteraan negara tetangga yang digagas oleh Perdana Menteri Mahatir ketika masih menjabat. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia juga menjalin kerja sama dengan negara tetangga terdekat. Malaysia diharuskan memiliki kerjasama untuk stabilitas dan terutama kerjasama yang difokuskan pada Indonesia, Filipina atau Thailand dan Singapura yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

3. Konflik Laut Cina Selatan

Berdasarkan kajian historis, konflik Laut Cina Selatan telah ada bahkan sebelum adanya konsep negara-bangsa (*nation state*) di kawasan Asia Tenggara. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan lokal telah memetakan dan melihat potensi besar di kawasan tersebut. Dorongan politik dari entitas secara bertahap muncul untuk menguasai Laut Cina Selatan. Salah satu entitas ini adalah Dinasti Han, yang juga merupakan poros



perdagangan di masa lalu, yang melihat potensi tersebut terutama jalur pelayaran barang dan jasa. Intensitas aktivitas Dinasti Han di kawasan lintas juga memicu aktor-aktor lokal di sekitar kawasan tersebut untuk terlibat aktif dalam perebutan sumber daya dan potensi Laut Cina Selatan. Misalnya Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Ayutthaya, Kerajaan Champa dan Kesultanan Melaka (Tonnesson, 2001). Aktor-aktor lokal tersebut silih berganti mengendalikan Laut Cina Selatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari tingginya arus perdagangan yang melewati kawasan tersebut.

Konflik antara aktor-aktor di dunia di kawasan Laut Cina Selatan hakikatnya adalah memperebutkan kedaulatan atas kawasan tersebut. Selain potensi sumber daya alam, hal yang paling fundamental dalam isu Laut Cina Selatan adalah masalah kedaulatan negara. Terjadinya tumpang tindih garis wilayah perbatasan yang diklaim oleh negara-negara terlibat terhadap pulau-pulau di Laut Cina Selatan adalah substansi dari konflik ini (Maksum, 2017). Jika ditelusuri lebih jauh, kompleksitas masalah di Laut Cina Selatan utamanya disebabkan oleh kegagalan perjanjian San Francisco tahun 1951 dalam menetapkan status Kepulauan Spratly paska kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Kawasan Laut Cina Selatan sendiri merupakan rangkaian pulau berjumlah lebih dari 30.000 pulau termasuk gugusan karang tidak hanya kaya akan potensi sumber daya alam, namun secara geografis posisi strategis kawasan ini juga menjadi incaran banyak negara untuk menggunakannya sebagai sistem pertahanan.

Hal ini menyebabkan eskalasi konflik menjadi ancaman serius di Laut Cina Selatan. Secara spesifik, beberapa negara secara resmi mengklaim kedaulatan mereka di Laut Cina Selatan. Sebut saja Kepulauan Paracel diklaim oleh tiga negara yaitu Cina, Taiwan dan Vietnam. Sedangkan Kepulauan Spratly menjadi rebutan antara Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam. Selain itu gugusan karang yang berada didekat Kepulauan Spratly juga menjadi sengketa antara Filipina, Cina dan Taiwan yang dikenal dengan Scarborough Shoal. Sumber utama konflik Laut Cina Selatan ialah klaim sepihak "*nine-dash line*" yang dibuat oleh Cina. Sebagian besar negara ASEAN memiliki beberapa kepentingan strategis di Kawasan Laut Cina Selatan tersebut,

meskipun sampai tahun 1995 ekspansi Cina di kawasan tersebut hanya mempengaruhi Vietnam, namun negara-negara lain di ASEAN bereaksi terhadap perebutan beberapa pulau oleh Cina tersebut.

4. Praktek Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu *“hot spots”* atau titik panas dalam lingkungan keamanan di kawasan Asia. Laut Cina Selatan merupakan tempat pertama dimana ambisi Cina berhadapan langsung dengan keputusan strategis Amerika Serikat. Banyak pemain baik negara-negara sedang hingga politisi kecil mencari keuntungan dari meningkatnya konfrontasi di kawasan ini. Pentingnya kawasan ini baik dari segi ekonomi dan keamanan membuat banyak negara dan aktor lainnya memberikan perhatian di kawasan ini. Bagi negara-negara ASEAN terutama yang merupakan kelompok negara yang paling dekat dengan kawasan ini, Laut Cina Selatan memiliki nilai strategisnya tersendiri. Bagi Vietnam misalnya, Laut Cina Selatan merupakan satu-satunya pintu gerbang ke lautan luas. Jadi apabila terhalangi maka dapat mencekik ekonomi dan keamanannya. Sedangkan bagi Filipina meskipun kawasan ini bukan satu-satunya akses terhadap lautan, namun terlalu dekatnya dengan pusat konflik sehingga dapat mengancam keamanan negaranya. Kemudian bagi Malaysia, kawasan ini sangat penting bagi keamanan, hubungan sosial politik, dan ekonomi antara dua wilayah Malaysia yaitu antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Bagi Indonesia sendiri, meskipun Indonesia bukan negara klaimant dalam konflik kedaulatan di Laut Cina Selatan, namun apapun yang terjadi di kawasan ini tentu dapat mempengaruhi keamanan, ekonomi, dan sosial politik negara. Sehingga apa-apa yang terjadi di kawasan ini menjadi penting untuk menjadi perhatian yang serius.

Konflik Laut Cina Selatan terjadi lantaran Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan masuk dalam kedaulatan negaranya berdasarkan klaim sejarah yang ditandai dengan *nine dash line* yang digambarkan dalam peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cina pada tahun 1953 (Tempo.co, 2016). Sayangnya klaim Cina tersebut tumpang tindih dengan kedaulatan negara lain berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Negara-negara yang wilayahnya masuk dalam klaim Cina diantaranya Cina, Taiwan, Brunei



Darussalam, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Dalam konflik ini episentrum atau pusat konflik adalah Cina melawan negara-negara yang wilayahnya masuk dalam klaim Cina. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara claimant lainnya. Seperti Filipina yang membawa kasus ini ke *Permanent Court of Arbitrase (PCA)* atau Mahkamah Arbitrase Antarbangsa pada tahun 2013. Pada tahun 2016 kemudian diputuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan hak ekonomi di Laut Cina Selatan (Tempo.co, 2016). Meski telah diputuskan demikian, Cina tidak bergeming dan tetap melakukan aktivitas pendudukan di kawasan tersebut. Bahkan seperti yang kita ketahui bersama Cina tengah membangun pangkalan militernya di kawasan ini. Beberapa waktu terakhir diberitakan bahwa citra satelit menunjukkan Cina sedang membangun pangkalan militer di kawasan Mischief Reef, kawasan yang diduduki Cina sejak tahun 1995 (Christiastuti, 2021).

Menghadapi situasi di Laut Cina Selatan yang semakin tinggi intensitas konfliknya, Malaysia tidak hanya mengupayakan penyelesaian sengketa secara politis dengan menggunakan normal diplomasi, namun juga menggunakan diplomasi pertahanan Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyampaikan bahwa Malaysia perlu memperhatikan peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara pemilik kekuatan besar di kawasan Laut Cina Selatan. Beliau juga menyampaikan bahwa strategi pertahanan Malaysia perlu mementingkan penggunaan diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri yang pragmatis, perjanjian internasional serta posisi geopolitik internasionalnya di kawasan Asia Pasifik (Republika, 2020).

Diplomasi pertahanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah penggunaan cara damai institusi pertahanan suatu negara untuk mengkoordinasikan pemerintah dan institusi negara lain demi mencapai hasil yang diinginkan. Bentuknya dapat berupa pertukaran personel, kunjungan kapal dan pesawat, kunjungan perwira tinggi, pertemuan dan dialog bilateral maupun multilateral, pelatihan bersama, forum pertahanan regional, bantuan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat membangun kepercayaan dan non proliferasi. Seperti yang kita bersama bahwa sikap Cina di Laut



Cina Selatan semakin hari semakin asertif. Pengambilalihan Mischief Reef memberikan pelajaran bagi negara-negara ASEAN bahwa Cina adalah negara yang kuat. Konfrontasi satu lawan satu bukanlah pilihan yang baik untuk menghadapi Cina. Kebijakan yang Cina terapkan adalah *occupy and negotiate* dimana Cina akan menduduki wilayah yang diklaimnya terlebih dahulu baru kemudian melakukan negosiasi. Tentu saja hal ini sulit diterima oleh negara-negara klaiman lainnya. Penyelesaian masalah melalui bilateral hanya akan melemahkan negara-negara ASEAN, karena tidak sebanding dengan kekuatan yang Cina miliki baik dari segi militer maupun ekonomi. Maka menurut Prof Ruhanas Harun yang disampaikan dalam Kuliah Kerja Luar Negeri Prodi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan, cara yang terbaik menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui ASEAN sebagai *deterrence*.

Diplomasi pertahanan sebagai langkah *deterrence* pernah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada bulan Agustus 1996 dimana pada waktu itu ketiga negara melakukan latihan militer bersama di Borneo. Pada tahun yang sama bulan September latihan perang juga pernah dilakukan oleh angkatan laut terbesar Indonesia yang diikuti oleh 27 kapal, 54 pesawat, serta hampir sekitar 20.000 personel. Angkatan Laut Cina juga turut mengirimkan 5 kapalnya untuk mengamati latihan tersebut, yang kemudian diikuti dengan pertemuan Staff Umum Cina dengan Presiden Soeharto pada waktu itu. Pada tahun tersebut Presiden Filipina juga berbicara dengan Presiden Cina pada pertemuan APEC, namun Cina justru memperkuat posisinya di pulau-pulau yang didudukinya meskipun situasi pada waktu itu stabil.

Platform ASEAN yang mencerminkan diplomasi pertahanan yang paling tepat adalah ADMM (*ASEAN Defence Ministers' Meeting*) atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN dan ADMM Plus (*ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus*) atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN dan negara mitra ASEAN. ADMM merupakan mekanisme konsultatif dan kerja sama pertahanan tertinggi di ASEAN yang didirikan sejak tahun 2006. Sedangkan ADMM Plus dibentuk pada tahun 2010. Tujuan dibentuknya ADMM dan ADMM Plus adalah untuk membangun rasa saling percaya melalui pemahaman yang lebih besar tentang tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan



transparansi dan keterbukaan di kawasan (admm.asean.org, 2017). Platform ini telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Melalui ADMM dari upaya dialog dan upaya membangun rasa saling percaya berpindah ke kegiatan praktis yang lebih konkret di bidang-bidang seperti keamanan maritim, kontra terorisme, operasi pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, kedokteran militer dan industri pertahanan. Maka sangat tepat dikatakan bahwa forum ini merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan yang paling tepat. Dalam forum ini terdapat dua unsur yang penting yaitu unsur diplomasi yaitu melalui pertemuan dan dialog multilateral serta unsur pertahanan yaitu dimana pertemuan dan dialog multilateral tersebut dilaksanakan oleh para pejabat pertahanan masing-masing negara ASEAN dan negara mitra ASEAN.

Sebuah pertanyaan kemudian muncul, apakah ADMM mampu mengelola keamanan di kawasan, khususnya sengketa di Laut Cina Selatan? Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan kerap kali mengalami pasang surut. Beberapa kegiatan baik ADMM maupun ADMM Plus telah dilaksanakan sebagai upaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Pada KTT ASEAN ke 45 tahun 2012 di Phnom Penh gagal menghasilkan komunikasi bersama karena ketidaksepakatan tentang masalah di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2015 ADMM Plus juga gagal menyepakati masalah di Laut Cina Selatan. Pada pertemuan tersebut Cina menentang penyebutan pulau buatan di Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Pada tahun 2018 juga dilaksanakan Pertemuan ADMM Plus di Singapura untuk membahas mengenai stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan. Namun keputusan maupun kesepakatan bersama tentang sengketa di Laut Cina Selatan masih belum menemukan titik temu. Pada tahun 2020 dalam pertemuan ADMM Plus, Menteri Pertahanan Cina mengatakan bahwa Cina dan ASEAN memiliki kebijakan dan kemampuan untuk menangani masalah Laut Cina Selatan dengan benar dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kerja sama pertahanan dan keamanan Cina-ASEAN semakin dalam dan telah menjadi model untuk keamanan regional.



Dalam ADMM Plus, para menteri pertahanan ASEAN juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama pertahanan Cina dengan ASEAN dan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Cina untuk menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan, perdamaian dan pembangunan regional. Namun demikian, terlepas dari niat baik yang sudah dilakukan, sejauh ini tidak banyak yang telah dicapai dalam hubungannya dengan sengketa di Laut Cina Selatan. Hal ini terlihat masih agresifnya aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Bahkan tak jarang kita jumpai Cina yang diwakili oleh *Coast Guard* dan kapal nelayannya memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan dalih latihan rutin maupun *traditional fishing ground*. Bahkan tidak hanya melalui laut, baru baru ini 16 pesawat Cina terbang memasuki wilayah kedaulatan Malaysia di atas perairan Serawak (bbc.com, 2021).

Meskipun Cina kerap kali melakukan tindakan yang asertif, namun Malaysia tetap mengutamakan penggunaan *soft power* yaitu dengan upaya negosiasi salah satunya melalui diplomasi pertahanan ketimbang dengan mengirimkan angkatan bersenjata. Dalam konsep diplomasi pertahanan tidak termasuk penggunaan operasi militer. Malaysia tidak menyukai aktivitas konfrontasi militer atau penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Maka apapun yang Cina lakukan terhadap Malaysia dalam sengketa Laut Cina Selatan, Malaysia tidak akan mengambil langkah konfrontasi militer. Hal ini timbul akibat adanya hubungan ekonomi yang erat antara Cina dan Malaysia. Cina adalah mitra dagang terbesar Malaysia selama 12 tahun berturut-turut dan sumber investasi asing terbesar dalam sektor manufaktur berturut-turut selama lima tahun (Republika, 2012).

Keadaan tersebut membuat Malaysia tidak akan mengambil langkah yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi negaranya, termasuk dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Maka yang dilakukan Malaysia adalah dengan *playing it safe* atau bermain aman yaitu dengan *quite diplomacy* melalui diplomasi pertahanan (Parameswaran, 2015). Berbeda halnya dengan negara-negara *claimant* ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam yang cenderung lebih vokal dalam menghadapi Cina. Meskipun memiliki respon yang berbeda, namun solidaritas Malaysia masih sama seperti negara-negara ASEAN yang



lain yaitu tidak mengakui *nine dash line*. Malaysia juga mempertanyakan dan menyoroti aktivitas militer pemilik kekuatan-kekuatan besar di Laut Cina Selatan yang dinilai justru memicu timbulnya konfrontasi dan ketidakstabilan kawasan.

5. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan yang ada konsep diplomasi militer berkembang menjadi konsep baru yang dikenal dengan diplomasi pertahanan. Konsep ini sebenarnya tidak memiliki definisi yang diakui secara global. Oleh karenanya tidak jarang setiap negara mempunyai definisi diplomasi pertahanan yang berbeda-beda. Bagi Malaysia sendiri diplomasi pertahanan diartikan sebagai penggunaan institusi pertahanan negara dalam masa damai untuk mengkooptasi pemerintah dan institusi negara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bagi Malaysia tujuan utama dilaksanakannya diplomasi pertahanan adalah untuk membentuk dan mengimplementasi kebijakan keamanan negara dalam menjalankan kebijakan keamanan negara, serta untuk menciptakan hubungan internasional yang stabil dan jangka panjang di bidang pertahanan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Malaysia adalah Konflik Laut Cina Selatan. Konflik ini disebabkan oleh *nine dash line* atau Sembilan garis putus-putus yang dikeluarkan secara sepihak oleh pemerintahan Cina dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Klaim *nine dash line* Cina ini banyak mengganggu batas teritori negara lain termasuk Malaysia, dimana jelas dalam konflik Laut Cina Selatan ini Malaysia merupakan salah satu dari negara *claimant state*. Diplomasi pertahanan kemudian menjadi jalan yang dipilih oleh pemerintah Malaysia dalam mengatasi konflik Laut Cina Selatan ini, salah satu sarana bagi Malaysia dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanannya adalah melalui ADMM dan ADMM Plus. Bagi Malaysia ADMM merupakan *ways* dari strategi diplomasi pertahanan yang diimplementasikan dalam bentuk upaya dialog dan upaya membangun rasa saling percaya pada bidang-bidang seperti keamanan maritim, kontra terorisme, operasi pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, kedokteran militer dan industri pertahanan.



Daftar Pustaka

- admm.asean.org. (2017, 02 06). *About the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*. Retrieved from admm.asean.org: <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm.html>
- bbc.com. (2021, Juni 02). *Malaysia Tuduh Cina Langgar Wilayah Udaranya di atas Perairan Serawak, Beijing klaim 16 Pesawatnya Terbang di Wilayah yang Relevan* . Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57328123>
- Christiastuti, N. (2021, 02 22). *Cina Bangun Pangkalan Militer Besar-besaran di Laut Cina Selatan*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/internasional/d-5400337/Cina-bangun-pangkalan-militer-besar-besaran-di-laut-Cina-selatan>
- Parameswaran, P. (2015, Maret 06). *Malaysia's South Cina Sea Policy: Playing It Safe*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2015/03/malysias-south-Cina-sea-policy-playing-it-safe/>
- Prof. Ruhanas Harun (2021, Juni 28) KKLN Prodi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
- Republika. (2012, Juni 01). *Cina Menganggap Malaysia Mitra Penting di ASEAN*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qtyxb01108206827/Cina-menganggap-malaysia-mitra-penting-di-asean>
- Republika. (2020, 05 18). *Raja Malaysia Soroti Kenaikan Aktivitas di Laut Cina Selatan*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qaivgm382/raja-malaysia-soroti-kenaikan-aktivitas-di-laut-cina-selatan>
- Tempo.co. (2016, Juli 12). *Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan*. Retrieved from Tempo.com: <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan>